

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu fenomena global yang memprihatinkan dan telah menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan secara umum dipahami sebagai kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Lebih dari sekadar persoalan ekonomi, kemiskinan juga berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai aspek sosial dan pembangunan, sehingga memperdalam kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan sering dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan dalam suatu negara (Todaro & Smith, 2020).

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Amanat konstitusional ini diperkuat melalui berbagai kebijakan nasional, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang menegaskan bahwa pemerintah menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama negara dalam



nan nasional (Kementerian Sekretariat Negara Republik 2009).

Dalam implementasinya, upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilakukan melalui berbagai program bantuan sosial. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dimasyarakat. Landasan hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan secara tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan komponen yang dimiliki dalam keluarga seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD-SMA, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Melalui program ini, diharapkan keluarga miskin dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam layanan dasar dan pada akhirnya mampu keluar dari siklus kemiskinan secara berkelanjutan. Meski demikian, efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah dapat dilihat dari variasi yang cukup signifikan, tergantung pada kesiapan sumber daya, keakuratan data, serta kapasitas kelembagaan di tingkat lokal (A. Murniawaty & Rusdarti, 2021).



Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2019, jumlah penduduk Indonesia mencapai 286,7 juta jiwa, dengan angka kemiskinan sebesar 23,85 juta jiwa atau 8,47%. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan

memberikan hasil positif. Namun demikian, kesenjangan masih terjadi antara wilayah kota dan desa, serta antarprovinsi, yang menunjukkan perlunya strategi kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran (Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, 2025).

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barru tercatat sebanyak 14,13 ribu jiwa atau sekitar 8,00% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), telah banyak memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, 2025)

Tingkat kemiskinan di setiap kecamatan di Kabupaten Barru menunjukkan bahwa ada tiga kecamatan yang masuk dalam tiga besar dalam tingkat kemiskinan terbanyak yaitu, Kecamatan Barru merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu sekitar 3.150 jiwa, disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau dengan 2.844 jiwa, dan Kecamatan Balusu dengan 2.325 jiwa. Tingginya angka kemiskinan di ketiga kecamatan tersebut disebabkan oleh masih dominannya masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pertanian dan nelayan tradisional, yang memiliki tingkat pendapatan tidak tetap (R. Hidayati, 2023)

Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah yang secara aktif melaksanakan berbagai program nasional, seperti Bantuan Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan telah mencakup seluruh di Kabupaten Barru, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Barru tahun 2024 mencapai sekitar



6.327 keluarga, yang tersebar di tujuh kecamatan. Berdasarkan distribusi data, Kecamatan Barru menempati posisi tertinggi dengan 1.350 KPM, diikuti oleh Kecamatan Balusu (Kelurahan Takkalasi) sebanyak 1.025 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Kecamatan Tanete Rilau sebanyak 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data ini menunjukkan program Program Keluarga Harapan (PKH) telah menargetkan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara proporsional (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023) (D. Palumpun, 2024).

Pada tahun 2025, terdapat tujuh kecamatan yang menjadi sasaran program, yakni Kecamatan Barru, Mallusetasi, Pujananting, Soppeng Riaja, Tanete Riaja, Tanete Rilau, dan Balusu. Bantuan diberikan setiap tiga bulan sekali, dalam empat tahap, dengan jumlah bantuan bervariasi sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh keluarga penerima. Misalnya, ibu hamil dan balita masing-masing menerima Rp 750.000 per tahap, siswa SD menerima Rp 225.000, SMP Rp 375.000, dan SMA Rp 500.000. Sementara itu, lansia dan penyandang disabilitas berat masing-masing menerima Rp 600.000 per tahap (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).

Kabupaten Barru dalam implementasinya berada pada jalur yang positif dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun hal tersebut harus tetap dilakukan penguatan sistem pendataan, peningkatan kapasitas pendamping sosial, dan optimalisasi program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin sehingga sangat penting untuk melakukan peningkatan implementasi Program Keluarga Harapan di masa | (A. Murniawaty & Rusdarti, 2021); (Nugroho, 2021a).



Meskipun program ini telah banyak membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Balusu, khususnya di Kelurahan Takkalasi, adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Masih ditemukan kasus di mana keluarga yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH), sementara keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu justru terdaftar dan menerima bantuan. Permasalahan ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai tujuan utama dari program tersebut (N. Hidayati, 2023).

Selain persoalan validitas data, kendala lain yang sering muncul adalah kurang maksimalnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menjalankan tugas, memberikan edukasi dan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik terkait penggunaan bantuan maupun perencanaan jangka panjang untuk keluar dari garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada sistem pendataan, mekanisme seleksi, pengawasan, dan koordinasi antar instansi yang harus berjalan secara optimal (A. Palumpun, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Kabupaten Barru. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah



berjalan sesuai dengan tujuan dan pedoman yang telah ditetapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi.
- 1.2.2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi.
- B. Untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.



teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai informasi terkait pengkajian masalah bagaimana Implementasi

penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga

Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi.

B. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada para aparat Kelurahan Takkalasi dan masyarakat itu sendiri tentang bagaimana sebenarnya pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga tidak terjadi lagi kekeliruan atau kesalahpahaman terkait dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang mencakup aspek kompleks, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang saling berkaitan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023), kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan daya beli minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan di lapangan karena kemiskinan tidak hanya mencakup kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.



im kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, n dipandang sebagai kegagalan sistemik dalam an pembangunan dan penyediaan layanan publik yang arto, 2020) menegaskan bahwa kemiskinan adalah suatu

hasil dari struktur sosial dan ekonomi yang tidak inklusif, di mana sebagian kelompok masyarakat tidak memperoleh akses yang memadai terhadap peluang ekonomi dan sosial. Maka dari itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dirancang bukan hanya untuk memberikan bantuan sementara, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan jangka panjang.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kemiskinan menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah tentunya memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif. Prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola program pembangunan sosial-ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar berdampak pada masyarakat miskin.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia secara nasional dilaksanakan melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini adalah suatu bentuk kebijakan bantuan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia serta rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui Program



Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, atau lansia berhak menerima bantuan tunai dengan kewajiban memenuhi persyaratan tertentu seperti menghadirkan anak di sekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).

Konsep kemiskinan yang digunakan dalam kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) menekankan pendekatan multidimensi, di mana kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. (World Bank, 2022) dalam World Development Report menyebutkan bahwa pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang efektif memerlukan intervensi lintas sektor yang melibatkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan sosial. Dengan demikian, keberhasilan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, upaya penanggulangan kemiskinan menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam fungsi regulatif, fasilitatif, dan kolaboratif. Pemerintah daerah berperan sebagai penyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal, penyedia layanan sosial, sekaligus fasilitator dalam membangun kemitraan dengan masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. Pendekatan dengan konsep collaborative governance, di mana persoalan publik yang kompleks, seperti kemiskinan, ditangani oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan



kolaborasi dengan berbagai aktor (Ansell & Gash, 2008).

Namun dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sering menghadapi tantangan di tingkat daerah, seperti terbatasnya sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan faktor kultural masyarakat yang masih bergantung pada bantuan pemerintah. (N. Hidayati, 2023) mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah masih terkendala oleh kurangnya kapasitas pendamping sosial, ketidaktepatan sasaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian ekonomi. Kondisi ini menandakan adanya ketimpangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan implementasi di lapangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dengan melibatkan mereka sebagai subjek, bukan sekadar objek penerima bantuan. Upaya pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, dan pembinaan sosial harus menjadi bagian integral dari kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dapat bertransformasi dari yang awalnya hanya bantuan sosial menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis kearifan lokal, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan upaya dalam menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.



an program Program Keluarga Harapan (PKH) di Takkalasi nantinya tidak hanya diukur dari jumlah manfaat, tetapi juga dari seberapa besar perubahan

perilaku, peningkatan kapasitas, dan kemandirian yang tercipta di tengah masyarakat.

1.4.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik karena dapat menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan di lapangan. Menurut (G. C. I. I. Edwards, 1980), implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan administratif yang nyata, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan tidak akan memiliki arti apa pun jika tidak diimplementasikan dengan baik.

George C. Edwards III memperkenalkan model implementasi kebijakan yang dikenal sebagai Direct and Indirect Impact on Implementation, yang menekankan empat faktor utama yang saling memengaruhi dalam menentukan tercapainya keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi kerangka analisis yang sederhana tetapi komprehensif untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dapat berjalan efektif atau justru gagal ketika diterapkan di lapangan.

1. Komunikasi



Merujuk pada sejauh mana kebijakan dapat disampaikan oleh para pelaksana di tingkat bawah. (G. C. I. I. Edwards, 1980) menjelaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif menimbulkan distorsi terhadap maksud dan tujuan kebijakan. Teks implementasi Program Keluarga Harapan (PKH),

komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pendamping sosial menjadi kunci utama agar setiap pelaksana memahami dengan jelas mekanisme pelaksanaan, syarat penerima manfaat, serta indikator keberhasilan program. Komunikasi yang terputus dapat menimbulkan salah persepsi di lapangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan atau tumpang tindih data keluarga miskin.

2. Sumber Daya

Mencakup segala bentuk dukungan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana. Menurut (G. C. Edwards, 1980) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan berjalan efektif. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), sumber daya manusia berperan besar melalui kinerja para pendamping sosial dan petugas dinas sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, ketersediaan data penerima manfaat yang akurat, sistem administrasi yang terintegrasi, serta dana operasional yang memadai menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di Kelurahan Takkalasi.

3. Disposisi atau sikap pelaksana

Hal berkaitan dengan tanggung jawab, komitmen, integritas, dan motivasi dari para aparat atau pelaksana kebijakan. (G. C. Edwards, 1980) menegaskan bahwa meskipun komunikasi dan sarana sudah baik, kebijakan tidak dapat berhasil tanpa kemauan dan dedikasi dari pelaksana. Dalam konteks pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sikap profesional



para pendamping sosial sangat menentukan keberhasilan program. Pendamping yang memiliki empati dan tanggung jawab tinggi akan lebih mampu membangun hubungan kepercayaan dengan masyarakat miskin, serta mendorong perubahan perilaku menuju kemandirian. Sebaliknya, jika disposisi pelaksana lemah, program bisa terhambat meskipun sumber daya dan peraturan sudah memadai.

4. Struktur Birokrasi

Menggambarkan sejauh mana organisasi pelaksana mampu menjalankan koordinasi dan prosedur kerja yang efisien. (G. C. Edwards, 1980) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terlalu hierarkis, kaku, dan tumpang tindih justru menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan. Dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah, koordinasi antara Dinas Sosial, aparat kelurahan, dan pihak-pihak lain seperti sekolah dan puskesmas sangat penting agar program dapat berjalan terpadu. Birokrasi yang efisien dan terkoordinasi memungkinkan proses distribusi bantuan berjalan lancar, mengurangi kesalahan administratif, dan meningkatkan transparansi pelaksanaan program.

Model Edwards III memberikan pemahaman bahwa keempat variabel tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan memengaruhi antara satu dengan yang lain. Komunikasi yang baik tanpa dukungan sumber daya akan menghasilkan pelaksanaan yang setengah hati; sumber daya yang



a disposisi yang kuat akan membuat implementasi tidak
1 birokrasi yang tertata tetapi tidak komunikatif akan
an kebingungan di tingkat pelaksana. Oleh karena itu,
gan antarvariabel menjadi kunci utama keberhasilan

implementasi kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi (G. C. Edwards, 1980) digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan dilaksanakan di Kelurahan Takkalasi. Pendekatan ini dianggap relevan karena memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap faktor-faktor internal birokrasi dan operasional yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan program. Dengan menggunakan teori ini, penelitian akan menilai sejauh mana komunikasi antar aktor berjalan efektif, apakah sumber daya yang tersedia mencukupi, bagaimana sikap para pelaksana di lapangan, serta seberapa baik struktur birokrasi mendukung proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat lokal.

Melalui penerapan model Edwards III, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih jelas tentang efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan. Hasil analisisnya tidak hanya bermanfaat untuk menilai kinerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan sosial lainnya.

1.4.3 Program Keluarga Harapan (PKH)



Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu strategis nasional dalam upaya pemerintah Indonesia ulangi kemiskinan berbasis bantuan sosial bersyarat. Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diluncurkan pada 7 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai

bagian dari strategi pembangunan sosial yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini berorientasi pada dua tujuan utama, yaitu membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan mendorong perubahan perilaku agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).

Secara konseptual, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial semata, tetapi juga sebagai policy instrument yang mengintegrasikan aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dalam implementasinya, keluarga penerima manfaat (KPM) diwajibkan memenuhi sejumlah komitmen, seperti memastikan anak-anak mereka rajin bersekolah, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil dan balita, serta mengikuti kegiatan pendampingan sosial. Dengan demikian, bantuan tunai bersyarat ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengubah perilaku keluarga miskin menuju kemandirian (Suharto, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) juga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu penghapusan kemiskinan, dan tujuan ketiga, yaitu peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan berbasis keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu contoh nyata dari implementasi kebijakan sosial yang menggabungkan



kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. an program ini sangat bergantung pada bagaimana i daerah, pendamping sosial, dan masyarakat penerima kerja sama dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mencerminkan bentuk implementasi kebijakan publik yang bersifat kolaboratif. Pemerintah pusat bertindak sebagai perumus kebijakan dan penyedia anggaran, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan, pendataan, serta pengawasan program di tingkat lokal. Pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial dan aparat kelurahan, memainkan peran penting dalam memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan kebijakan sosial (Nugroho, 2021a).

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, Kementerian Sosial menetapkan keberadaan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap wilayah. Pendamping sosial berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi dan memantau kepatuhan terhadap syarat program, tetapi juga memberikan motivasi serta bimbingan sosial agar keluarga miskin dapat mengelola bantuan dengan bijak dan mengembangkan potensi ekonomi mereka. Dalam hal ini, pendamping sosial merupakan pelaku utama dalam proses implementasi kebijakan di tingkat akar rumput, sesuai dengan pandangan (G. C. I. I. Edwards, 1980) bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada kemampuan dan komitmen di lapangan.



pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga di oleh beberapa faktor penting sebagaimana dijelaskan di implementasi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber

daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan pendamping sosial akan memastikan pemahaman yang seragam mengenai mekanisme program. Sumber daya yang mencukupi, baik dari segi anggaran maupun kapasitas pendamping, menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Disposisi pelaksana, yakni sikap dan komitmen para petugas, menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program. Sementara itu, struktur birokrasi yang efisien akan mempermudah koordinasi antarinstansi dan mempercepat proses penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti akurasi data penerima manfaat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala geografis di daerah tertentu. Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pendamping sosial, dan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara teratur juga penting untuk memastikan program tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Evaluasi ini sejalan dengan prinsip feedback loop dalam kebijakan publik, di mana hasil implementasi menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang (Dunn, 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan wujud konkret dari implementasi kebijakan publik yang mengedepankan an sosial dan pembangunan inklusif. Program ini tidak ungsi mengurangi masalah ekonomi masyarakat miskin, i untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya , kesehatan, dan kemandirian keluarga. Dalam konteks



Kelurahan Takkalasi, keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada sinergi antar aktor kebijakan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan empat faktor utama implementasi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III.

Dengan pendekatan implementasi yang baik dan berbasis tata kelola pemerintahan yang partisipatif, Program Keluarga Harapan diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara empiris bagaimana kebijakan nasional tersebut diimplementasikan di tingkat kelurahan dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di lapangan.

1.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah landasan berpikir yang menyajikan hubungan antar konsep atau variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jika kerangka teori berisi uraian tentang teori-teori yang relevan, maka kerangka konseptual merupakan penyederhanaan teori dan konsep yang dipilih peneliti untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan kata lain, kerangka konseptual menjadi "jembatan" antara teori dan realitas empiris yang ingin diteliti.

Kerangka pikir berfungsi untuk menunjukkan alur logika mulai dari masalah yang dikaji, teori yang digunakan sau analisis, hingga hasil yang diharapkan. Dalam Ilmu pemerintahan, kerangka konseptual sangat penting membantu peneliti memfokuskan kajian pada aspek ri fenomena pemerintahan yang kompleks.



Peraturan Menteri Sosial Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

**Implementasi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan Melalui PKH
Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan PKH**

Teori George C Edward III

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Sikap Pelaksana
- d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Pendataan dan Verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- b. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai
- c. Pendampingan Keluarga Penerima



an Program

Faktor Pendukung

- a. Komunikasi yang Efektif
- b. Ketersediaan Sumber Daya
- c. Komitmen dan Sikap Pelaksana
- d. Dukungan Struktur Birokrasi dan Kelembagaan

Faktor Penghambat

- a. Ketidaktepatan Data dan Validasi KPM
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- c. Rendahnya Kesadaran Kemandirian Masyarakat
- d. Koordinasi dan Komunikasi Struktur Birokrasi

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, maka digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut prinsip dasar metodologi penelitian, metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata dan ungkapan. Metode kualitatif bertujuan untuk mengungkap berbagai aspek kehidupan sehari-hari individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi secara komprehensif, rinci, inklusif dan bertanggung jawab secara ilmiah (Nasution, 2016). Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu keadaan, situasi atau kondisi lain, dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Permana, 2024). Peneliti tidak mengubah, menambah atau memanipulasi objek atau bidang penelitian. Peneliti memotret apa yang terjadi pada objek atau area yang diteliti dan menggambarkan secara langsung dalam bentuk laporan penelitian (Goldberg et al., 2023).

Penelitian ini juga merupakan studi lapangan, dan karena sebagian besar kegiatan penelitian kualitatif berkaitan dengan lapangan, maka peneliti hendaknya lebih dekat dengan orang-orang di lingkungan penelitian agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian lapangan adalah penelitian yang sifat masalahnya berkaitan dengan individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, serta latar belakang dan kondisi peserta didik



ampunan untuk mempelajari dan memahami situasi atau lingkungan institusi, kelompok sosial atau individu (Rande & 25). Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajiannya adalah tindakan atau aktivitas beberapa orang dan sesuai

dengan sifat dan tujuan peneliti yang ingin mendapatkan gambaran pemahaman sosial yang sebenarnya.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus utama pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru. Lokasi ini dipilih karena Kelurahan Takkalasi merupakan wilayah yang menempati posisi kedua dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cukup tinggi di Kabupaten Barru, sehingga dianggap representatif untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kelurahan. Karakter sosial-ekonomi masyarakat Takkalasi yang didominasi banyaknya pekerjaan di sektor informal menjadikan wilayah ini menarik untuk dikaji, karena dinamika sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan dengan keberhasilan implementasi program penanggulangan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Penelitian berlangsung selama satu bulan, yaitu pada bulan November 2025, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh data yang mendalam melalui observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Pendekatan waktu yang relatif panjang ini penting agar peneliti dapat memahami secara menyeluruh proses implementasi kebijakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan,



Optimized using
trial version
www.balesio.com

asi, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang kedalaman pemahaman terhadap fenomena sosial nti, 2023).

an Kelurahan Takkalasi dan Dinas Sosial Kabupaten i lokasi penelitian memiliki dasar teoretis yang kuat.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh aktor pelaksana di tingkat daerah sebagai ujung tombak kebijakan (Nugroho, 2021). Dinas Sosial Kabupaten Barru berperan sebagai pelaksana teknis Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertanggung jawab atas proses identifikasi penerima manfaat, penyaluran bantuan, pendampingan sosial, serta evaluasi terhadap dampak program di Masyarakat.

2.3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu elemen krusial dalam penelitian kualitatif, karena kualitas data yang diperoleh akan sangat memengaruhi kedalaman analisis dan validitas temuan penelitian (Creswell & Creswell, 2018) Dalam penelitian ini, sumber data akan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Peneliti melakukan wawancara tatap muka untuk memperoleh hasil atau informasi yang akurat langsung dari informan untuk memudahkan interpretasi temuan penelitian (Sugiyono, 2019).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang mendukung dan sesuai dengan objek penelitian. Sumber data ini

uku-buku, dokumen resmi, berita, aturan operasional,



serta publikasi lain yang berhubungan dengan penerapan sistem pemerintahan daerah dan dinamika sosial politik di daerah penelitian. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan, baik yang diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, laporan resmi, maupun sumber daring yang terpercaya. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk memperkaya analisis dan memperkuat temuan dari data primer yang diperoleh secara langsung (Poedjiastutie, 2021).

2.4. Informan Penelitian

Adapun Informan Penelitian ini antara lain:

- Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru
- Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru
- Koordinator Kabupaten Barru (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH)
- Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi
- Lurah Kecamatan Takkalasi
- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini adalah suatu tahapan penelitian yang



...ing karena bertujuan untuk memperoleh informasi. ... data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ... ut:

sistematis untuk memperoleh informasi, yang kemudian diolah untuk keperluan penelitian. Menurut Sugiyono, observasi adalah suatu kegiatan mencari informasi, yang atas dasar itu dapat diambil suatu kesimpulan (Sugiyono, 2019). Observasi adalah suatu teknik atau metode mengamati kegiatan yang sedang berlangsung dan mengumpulkan informasi. Pendapat berbeda dikemukakan Nasution dengan alasan observasi merupakan dasar dari segala ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan informasi atau fakta yang diperoleh selama observasi (Nasution, 2016).

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memiliki pedoman pertanyaan pokok, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih luas sesuai pengalaman mereka. Informan yang diwawancarai meliputi pejabat dan staf Dinas Sosial Kabupaten Barru, Koordinator Kabupaten Barru (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi, Lurah Kelurahan Takkalasi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Fokus pertanyaan diarahkan pada empat variabel teori implementasi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi

c. Studi Dokumentasi



Studi dokumenter adalah informasi yang dikumpulkan dari dokumen yang dapat diakses dan disimpan baik dalam bentuk elektronik maupun cetak, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian peneliti (Bowen, 2009).

2.6. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi, Kabupaten Barru. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Takkalasi serta faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (G. C. Edwards, 1980) (Nugroho, 2021).

Pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi melibatkan beberapa tahapan dan kegiatan yang saling berkaitan, meliputi:

a. Pendataan dan Verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Tahapan awal pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dengan proses pendataan dan verifikasi keluarga miskin berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diberikan kepada keluarga yang berhak, sehingga proses penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Takkalasi (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).



in Bantuan Sosial Tunai

yaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

secara berkala kepada Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) melalui lembaga keuangan yang telah ditunjuk pemerintah. Bantuan ini digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi anak. Dengan adanya bantuan tunai ini, diharapkan beban ekonomi keluarga dapat berkurang dan kualitas hidup mereka meningkat (R. Hidayati, 2023).

c. Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat

Pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, proses pembinaan, dan motivasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar lebih mandiri secara ekonomi. Pendampingan yang dilakukan meliputi pertemuan kelompok, sosialisasi, serta pelatihan keterampilan dasar yang menunjang proses peningkatan kapasitas dan produktivitas keluarga miskin. Melalui kegiatan ini, keluarga penerima diharapkan tidak bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri dalam jangka panjang (D. Palumpun, 2024).

d. Monitoring Pelaksanaan Program

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Dinas Sosial bersama para pendamping sosial. Proses ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan, serta menilai dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah

untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih optimal dan berkelanjutan (Dinas Sosial Republik Indonesia, 2022).



Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), dalam perspektif teori George C. Edwards III, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan keempat aspek tersebut, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Takkalasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Komunikasi yang Efektif

Koordinasi yang baik antara pendamping sosial, pemerintah daerah, dan Keluarga Penerima Bantuan (KPM) menjadi faktor utama yang mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sosialisasi dan proses penyampaian informasi yang jelas terkait mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai Keluarga Penerima Bantuan (KPM) (R. Hidayati, 2023).

b. Ketersediaan Sumber Daya

Adanya dukungan dana bantuan dari pemerintah pusat serta tenaga pendamping sosial yang aktif di lapangan menjadi penunjang penting keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, penggunaan sistem informasi kesejahteraan sosial mempermudah proses pendataan, validasi, dan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait bantuan diterima. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023).



c. Komitmen dan Sikap Pelaksana (Disposisi).

Tingginya dedikasi dan tanggung jawab para pendamping sosial serta aparat kelurahan dalam menjalankan tugas menjadi salah satu faktor dalam mencapai keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Komitmen pelaksana terhadap tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (A. Palumpun, 2024).

d. Dukungan Struktur Birokrasi dan Kelembagaan

Regulasi yang jelas serta kerja sama antarinstansi seperti Dinas Sosial, pendamping sosial dan pemerintah kelurahan dapat mendukung keterpaduan kebijakan dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan (Nugroho, 2021).

2. Faktor Penghambat

a. Ketidaktepatan Data dan Validasi KPM

Masih ditemukan data penerima bantuan yang tidak akurat, seperti keluarga yang sudah masuk kategori sejahtera tetapi masih mendapatkan bantuan, atau keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Kondisi ini mengakibatkan ketidaktepatan sasaran dan menurunkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022).

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)



jumlah pendamping sosial yang terbatas serta beban yang cukup tinggi menyebabkan proses pendampingan dan monitoring tidak berjalan secara maksimal, terutama dalam memberikan edukasi dan bimbingan berkelanjutan kepada

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (N. Hidayati, 2023)

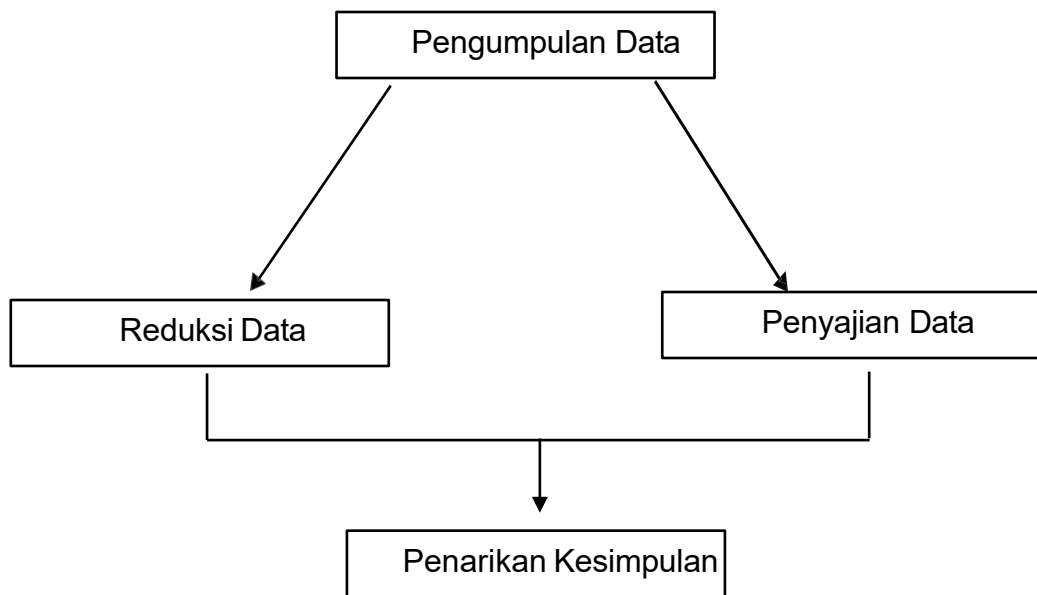
- c. Rendahnya Kesadaran dan Kemandirian Masyarakat Sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih bergantung pada bantuan sosial dan belum menunjukkan upaya signifikan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kendala dalam keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) (D. Palumpun, 2024).
- d. Koordinasi dan Komunikasi Struktur Birokrasi yang Belum Optimal karena kurangnya sinergi antara pendamping sosial, pihak pemerintah kelurahan, dan instansi terkait terkadang menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan serta kendala teknis dalam proses pendataan dan evaluasi (Nugroho, 2021).

2.7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data, mengorganisasikannya, memecahnya menjadi unit-unit yang mampu dikelola, menemukan pola, mengidentifikasi tindakan dan memberikan pembelajaran penting, serta memutuskan apa yang akan dikomunikasikan kepada orang lain (Miles et al., 2019). Mendeskripsikan data berarti memperjelas informasi yang ada agar peneliti dan pihak lain yang terlibat dengan hasil penelitian dapat lebih memahami gambaran responden yang sebenarnya (Patton, 2015). Materi yang bersifat kualitatif, maka data deskriptif menggambarkan



pokoknya ia menggambarkan apa yang dilihatnya, dirasakannya dan ditanyakannya, sehingga segala diketahuinya bersifat dangkal. (Babbie, 2020).



Gambar 1. 2 Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Berdasarkan Pemikiran Miles dan Huberman

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data atau informasi dilakukan melalui proses wawancara terhadap informan kunci yang berkaitan atau selaras dengan penelitian dan disertai observasi langsung ke lapangan untuk memastikan penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan data yang sesuai.

b. Reduksi data

Proses pemilihan pemusatan perhatian kepada penyederhanaan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di



data

ajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi

dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan memperkuat pemahaman penelitian terkait informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupun uraian penjelasan.

d. Penarikan Kesimpulan

Adapun proses penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir yang dilakukan secara saksama di lapangan sehingga data-data diuji validasinya.

